

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang diikuti oleh kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia untuk mengimplemtasikan sistem pemerintah berbasis elektronik (*e-government*). Penerapan *e-government* merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Di Indonesia, implementasi *e-government* telah menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Shabihah et al., 2025). Komitmen tersebut diperkuat melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pendoman dalam penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, pemerintah di tingkat provinsi maupun daerah terus mengadopsi konsep *e-government* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Sudirman & Saidin, 2023).

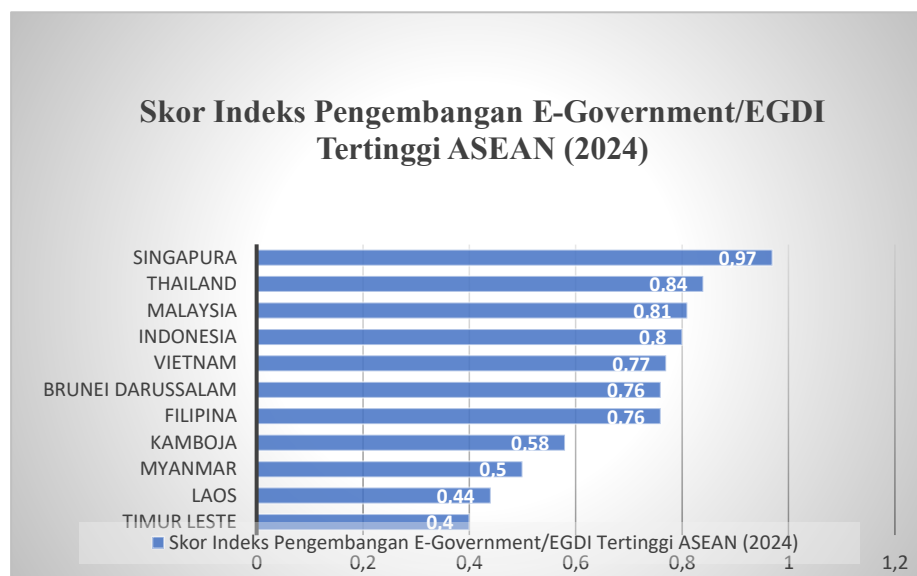
Transformasi menuju *e-government* telah menjadi tren yang berkembang pesat baik di tingkat global maupun nasional termasuk di Indonesia. Perkembangan ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akses informasi bagi Masyarakat (Seputar birokrasi, 2024). Selain

itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik Berbasis Elektronik juga menjadi landasan hukum yang mendorong implementasi layanan publik secara digital. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat (Rusdy & Flambonita, 2023).

E-government atau pemerintahan berbasis elektronik mencakup tiga bentuk utama, yaitu *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Government* (G2G). Penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung keterbukaan, efisiensi, serta kemudahan akses terhadap berbagai layanan pemerintahan. Digitalisasi proses administrasi memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat maupun dunia usaha, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan birokrasi. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, penerapan e-government juga berkontribusi dalam memperkuat pengawasan, transparansi, dan akutabilitas penyelenggaraan pemerintah. Melalui sistemn berbasis elektronik, setiap proses administrasi dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan pelaksanaan audit secara lebihh efektif dan akurat (Chaitra et al., 2023).

Berbagai aplikasi dan sistem informasi telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan, mulai dari pengelolaan

keuangan, perizinan, hingga pengawasan pembangunan daerah. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi ini masih cukup besar, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta budaya organisasi yang harus bertransformasi agar inovasi digital dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah (Hasanah et al., 2024).



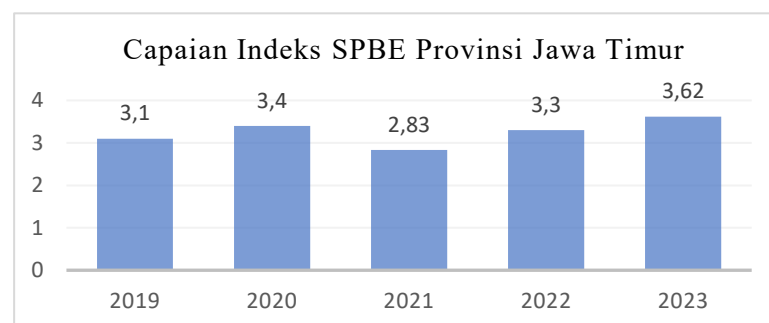
Gambar 1. 1 Indeks Pengembangan *E-Government* Tertinggi ASEAN Tahun 2024

Sumber : Indonesia Jadi Negara dengan Sistem *E-Government* Terbaik Ke-4 di ASEAN - GoodStats, diakses pada 29 September 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 merupakan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjudul *E-Government Survey 2024*, nilai Indeks Pengembangan *E-Government* (EGDI) negara-negara ASEAN pada tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata dalam tingkat penerapan *e-government*. Singapura menempati posisi teratas dengan skor mendekati nilai maksimal, yakni sekitar 0,97, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam infrastruktur digital, dukungan

kebijakan pemerintah, serta tingginya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Negara tersebut telah lama dikenal sebagai pelopor di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan teknologi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat keempat dengan skor 0,8, yang mengindikasikan adanya perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Iswenda, 2025).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, dengan luas wilayah sekitar 48,036,84 km² dan populasi mencapai lebih dari 40 juta jiwa pada tahun 2024. Sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta (Syifa, 2025). Dalam hal transformasi digital, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendorong implementasi *e-government* melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Transformasi digital yang terbangun telah mengantarkan Jatim masuk dalam 10 besar provinsi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik nasional.



Gambar 1. 2 Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023

Sumber: [https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/indeks-spbe-jatim-meningkat-dari-](https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/indeks-spbe-jatim-meningkat-dari-baik-ke-sangat-baik)

baik-ke-sangat-baik - diakses pada 20 Oktober 2025

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital. Komitmen tersebut tercermin dari peningkatan nilai Indeks SPBE yang naik dari 3,30 pada tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Kenaikan ini juga menunjukkan peningkatan kategori penilaian, dari predikat baik menjadi sangat baik (Newsroom, 2024).

Penerapan *e-government* di Indonesia terus berkembang, termasuk di wilayah Jawa Timur, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola proses administrasi dan keuangan secara lebih efektif dan integrasi. Dalam hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan aplikasi E-Kenda sebagai salah satu inovasi digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi anggaran daerah.



Gambar 1. 3 Halaman Utama Aplikasi E-Kenda

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Sidoarjo, 2022

Gambar 1.3 merupakan gambar halaman utama pada aplikasi E-Kenda yang dikembangkan oleh administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang di tingkat pemerintahan daerah seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo inovasi teknologi seperti aplikasi E-Kenda dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Aplikasi ini merupakan sistem berbasis *web* dan *Mobile Android* yang memantau paket pekerjaan pembangunan secara real-time, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir, dengan mengintegrasikan data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penggunaan metode *Decision Support System* (DSS) dalam E-Kenda memungkinkan pimpinan daerah untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis risiko dan progres pelaksanaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyimpangan.

Di Kabupaten Sidoarjo implementasi *e-government* diwujudkan melalui pengembangan aplikasi E-Kenda yang mulai diuji coba pada September 2020 dan diterapkan secara penuh pada Juni 2021. Penerapan aplikasi ini didukung oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksana E-Kenda sebagai salah satu inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kabupaten yang digunakan untuk mendukung proses pengendalian Pembangunan secara elektronik.

Proses pengendalian Pembangunan sebelum adanya E-Kenda masih dilakukan secara manual melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) yang mengandalkan peninjauan lapangan serta evaluasi administrasi oleh tiga orang staf pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2019, dari total 22.562 paket pekerjaan, sebanyak 3.693 paket atau sekitar 16,37% mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Selain itu, terdapat 19 paket pekerjaan strategis yang penyelesaiannya melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,128 triliun atau sekitar 21% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5,3 triliun. Tingginya nilai SiLPA tidak hanya berdampak pada terjadinya praktik korupsi serta inefisiensi birokrasi. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) (Sidoarjo, 2021).

Pengguna aplikasi E-Kenda terdiri dari beberapa pihak yang memiliki peran dan kewenangan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu PPKom, Konsultan Pengawas, Pengendali, dan Pimpinan. PPKom berperan dalam pengelolaan paket pekerjaan, termasuk penugasan konsultan pengawas, verifikasi laporan kemajuan, serta pengelolaan manajemen risiko. Konsultan Pengawas bertugas melakukan input target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, mengunggah bukti fisik di lapangan dalam pemilahan dan pengawasan paket pekerjaan, melakukan evaluasi terhadap deviasi pelaksanaan, serta menyampaikan laporan dan

notifikasi kepada pihak terkait. Sementara itu, pimpinan berfungsi sebagai pengambil Keputusan dengan memanfaatkan informasi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem E-Kenda sebagai dasar evaluasi dan penentuan kebijakan tindak lanjut Pembangunan.



Gambar 1. 4 Penyerahan Penghargaan INOTEK Tahun 2023

Sumber : Administrasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 aplikasi E-Kenda memperoleh penghargaan Inotek Award dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam kategori Inovasi Daerah. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data serta penyelenggaraan layanan publik secara elektronik. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi E-Kenda dinilai mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi pemerintahan daerah. Melalui berbagai fitur yang dimiliki, seperti integrasi data secara *real-time* dan antarmuka yang mudah digunakan, aplikasi E-Kenda mendukung aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas secara lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan Pembangunan daerah. Pencapaian tersebut mencerminkan digital dilingkungan

pemerintahan daerah sekaligus menjadi contoh bagi pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi di berbagai daerah di Indonesia.

Pada sebelum tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sangat tinggi, lebih dari Rp 1 triliun atau sekitar lebih dari 20% per tahun, menunjukkan hambatan dalam penyerapan anggaran sekaligus pelaksanaan program/kegiatan yang tidak optimal, rata-rata pelaksanaan kegiatan tepat waktu hanya berada di kisaran 81,33 %, mengindikasikan adanya keterlambatan dan kurangnya pengendalian secara real time (Republikjatim.com, 2021).

Tabel 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2021 - 2024

TAHUN	SILPA
2021	Rp. 840.000.000.000,00
2022	Rp. 950.000.000.000,00
2023	Rp. 511.900.000.000,00
2024	Rp. 642.000.000.000,00

Sumber : Sidoarjonews.id, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan terkait perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Data menunjukkan bahwa SiLPA mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 950 miliar, kemudian menurun pada tahun – tahun berikutnya menjadi Rp 511,9 miliar pada 2023 dan naik kembali menjadi Rp 642,78 miliar pada 2024. Tahun 2021, SiLPA mencapai sekitar Rp 840 miliar. Kenaikan dan penurunan SiLPA ini mencerminkan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan

realisasi di lapangan yang Sebagian besar dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan keuangan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aplikasi E-Kenda meskipun telah mendapatkan penghargaan tetapi masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan terkait SiLPA yang menjadi masalah pada tahun-tahun sebelumnya hingga diluncurkan aplikasi E-Kenda ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Laporan tersebut mencakup pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang satu tahun anggaran, yang meliputi realisasi anggaran serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, terlihat bahwa beberapa dinas belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan, sehingga berkontribusi pada tingginya nilai SiLPA. Beberapa dinas tercatat memiliki Tingkat penyerapan anggaran yang belum maksimal, antara lain :

Tabel 1. 2 Data Instansi dengan Serapan Anggaran Kurang Maksimal di
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Nama Instansi	SiLPA
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 64,313,880,922
2.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA)	Rp 63,721,906,217
3.	Sekretariat DPRD	Rp 28,706,064,302
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 23,758,893,767
5.	Dinas Kesehatan	Rp 18,480,432,306
6.	Dinas Perhubungan	Rp 12,142,395,552
7.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Rp 11,316,181,387
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 10,051,403,302
9.	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp 9,372,768,885
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 1,435,729,301

Sumber : <https://sidoarjonews.id/sejumlah-opd-pemkab-sidoarjo-dengan-silpa-apbd-2024-tertinggi/>- diakses pada 29 September 2025

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang serapan anggarannya kurang maksimal. Pada Tahun Anggaran 2024 di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp642,78 miliar atau setara dengan 12,4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, yang mencatatkan SiLPA sebesar Rp511,90 miliar. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, M Zakaria Dimas mengatakan bahwa:

“Tingginya SiLPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan. Artinya tambah Dimas, perencanaan yang dilakukan OPD belum efektif dalam pelaksanaannya.”

(Sumber: <https://sidoarjonews.id/sejumlah-opd-pemkab-sidoarjo-dengan-silpa-apbd-2024-tertinggi/>, diakses pada 17 Oktober 2025)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya SiLPA di Kabupaten Sidoarjo mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program oleh OPD, sehingga perencanaan yang ada belum berjalan efektif. Meskipun demikian, tidak semua SiLPA bersifat negatif karena beberapa program tetap berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, dan berprioritas agar berbagai tantangan pembangunan di Sidoarjo dapat diatasi secara optimal (Sidoarjonews.id, 2025).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan angka yang konsisten tinggi selama periode tahun 2018 hingga 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah relatif rendah, yang dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif, seperti kurang optimalnya pemanfaatan dana publik untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fenomena ini mengharuskan kita untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Dengan begitu, penggunaan dana daerah bisa lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan di daerah bisa tercapai secara maksimal.

Beberapa masalah yang sering dilaporkan meliputi ketidakmampuan pengguna untuk mengakses aplikasi secara keseluruhan, kesulitan dalam proses

login yang berulang kali gagal, serta keterlambatan *upload* pekerjaan yang disebabkan oleh gangguan pada pengiriman data, termasuk ketidakmampuan mengunggah foto pekerjaan pada waktu tertentu. Selain itu, aplikasi ini kerap mengalami *error* yang mengganggu alur kerja, sehingga memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem secara keseluruhan.



Gambar 1. 5 Komentar Pengguna Aplikasi E- Kenda di *Playstore*

Sumber : *Playstore*, 2024

Gambar 1.5 menunjukkan komentar pengguna aplikasi E-Kenda di *Playstore* yang mencerminkan berbagai kendala teknis yang dialami. Pengguna mengeluhkan masalah seperti buffering yang lama, *loading* data yang lambat, kesulitan dalam pengambilan dan pengunggahan foto pekerjaan, serta kendala *login* yang sering gagal. Selain itu, beberapa komentar juga menyoroti gangguan sistem yang menyebabkan *error* dan memperlambat proses kerja. Komentar-komentar ini

menggambarkan pentingnya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan performa dan stabilitas aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih optimal.

Penulis akan mengukur tingkat penerimaan dan manfaat aplikasi E-Kenda melalui penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM). Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah teori pengembangan dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) dimana pada teori ini sering dipakai untuk menganalisis psikologi sosial. *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan untuk memahami bagaimana individu menerima dan mengadopsi teknologi baru. Model ini digunakan untuk menganalisis serta memprediksi tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi, dengan fokus pada faktor-faktor seperti persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan.

Aplikasi E-Kenda perlu dianalisis penerimaannya karena sistem ini melibatkan banyak pengguna dengan peran, hak akses, dan tingkat kompleksitas tugas yang berbeda, mulai dari PPKom, Konsultan Pengawas, Pengendali, hingga Pimpinan. Meskipun penggunaannya bersifat wajib dalam proses pengendalian Pembangunan daerah, keberhasilan implementasi E-Kenda tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fitur, tetapi juga oleh sejauh mana pengguna memahami, menerima, dan mampu memanfaatkan sistem secara optimal dalam menjalankan tugasnya, seperti input target, realisasi, manajemen risiko, serta pelaporan. Analisis penerimaan pengguna menjadi penting untuk mengetahui apakah aplikasi telah dianggap mudah digunakan, bermanfaat, dan mendukung pekerjaan pengguna

sesuai tujuan pengembangannya, sehingga dapat mengidentifikasi kendala penggunaan serta menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan sistem agar E-Kenda benar-benar efektif sebagai alat pengendalian Pembangunan daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sabela *et al.* (2024) dimana tujuannya untuk menganalisis pengaruh persepsi kemanfaatan dan 13 kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan aplikasi e-layanan mandiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan tiga variabel dalam model *Technology Acceptance Model* TAM, sehingga perlu adanya tambahan variabel yaitu penambahan variabel penggunaan nyata sistem hal tersebut dapat memberikan penjelasan serta pemahaman yang lebih komprehensif melalui hubungan variabel niat pengguna dan penggunaan nyata aplikasi.

Teori ini dianggap relevan untuk dapat mengukur dalam pengadopsian berbasis teknologi. Sebagai tambahan peneliti menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah karena dalam metode ini dapat memberikan pemahaman atau penjelasan yang kuat dan sederhana tentang penerimaan aplikasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bagaimana faktor tertentu mempengaruhi penerimaan pada suatu sistem serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku pengguna berinteraksi dengan sistem informasi baru (Alif & Andikaputra, 2024).

Adapun peneliti menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), dimana terdapat variabel yang digunakan yaitu persepsi kemudahan pengguna (*Perceived Ease of Use*), persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*), Persepsi minat perilaku pengguna (*Behavioral Intention to Use*), persepsi penggunaan nyata sistem

(*Actual System Usage*). Pada penelitian ini menggunakan modifikasi *Technology Acceptance Model* (TAM) dimana peneliti tidak memakai variabel persepsi sikap penggunaan (*Attitude Towards Use*). Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari Arief & Sihotang (2025) yang mana pada hasil memperlihatkan bahwa niat perilaku (*Behavioral Intention to Use*) saat menggunakan aplikasi tidak selamanya dipengaruhi oleh sikap pengguna. Menurut Davis (1989) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap tidak selamanya memediasi pengaruh dalam persepsi kegunaan (PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (PEOU) terhadap suatu perilaku. Berkaitan dengan modifikasi model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang mana Davis (1996) mengeliminasi pada variabel sikap pengguna (*Attitude Toward Using*). Davis (1996) mengeliminasi variabel sikap terhadap penggunaan karena penelitian empiris menunjukkan bahwa sikap tersebut tidak mempengaruhi niat.

Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kelayakan aplikasi E- Kenda digunakan oleh OPD Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi media informasi penyampaian administrasi pembangunan yang berkaitan dengan model *Technology Acceptance Model* (TAM). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik memilih judul untuk penelitian yaitu **“Analisis Penerimaan Pengguna Aplikasi Elektronik Kendali Pembangunan Daerah (E-Kenda) Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang telah dijabarkan diatas, maka ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap Aplikasi Elektronik Kendali Pembangunan Daerah (E-Kenda) di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM)?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pengguna aplikasi E-Kenda berdasarkan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) guna mengeksplorasi peran aplikasi tersebut dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam menganalisis penerimaan pengguna aplikasi *e-government*, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pembangunan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam menganalisis penerimaan aplikasi e-kenda di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi atau literatur penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, informasi, dan masukan kepada dinas terkait dalam meningkatkan penerimaan pengguna aplikasi E-Kenda berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), guna mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.